



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Layanan Informasi Dokumentasi,
Inovasi dan Kebijakan dalam
Mendukung Implementasi
Keterbukaan



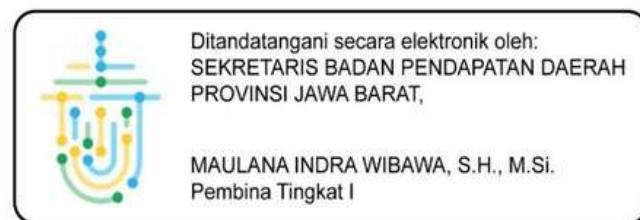
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

bentuk Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan suatu pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik pada masyarakat maupun **stakeholder** terkait melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Struktur Organisasi PPID Bapenda Provinsi Jawa Barat	5
BAB II GAMBARAN UMUM PPID	5
2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Informasi Publik	5
2.2 Sumber Daya Manusia dan Inovasi Pengembangan Layanan Informasi	9
BAB III LAYANAN INFORMASI PUBLIK	12
3.1.1 Pelayanan Informasi Publik dan Rincian Jumlah Permintaan	12
3.1.2 jumlah Permintaan Informasi Publik.	13
3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik	15
3.1.4 SP4N LAPOR Bapenda Jawa Barat	15
3.1.5 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat	16
3.1.6 Alur Permohonan Informasi Publik Bapenda Jawa Barat	17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, Sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

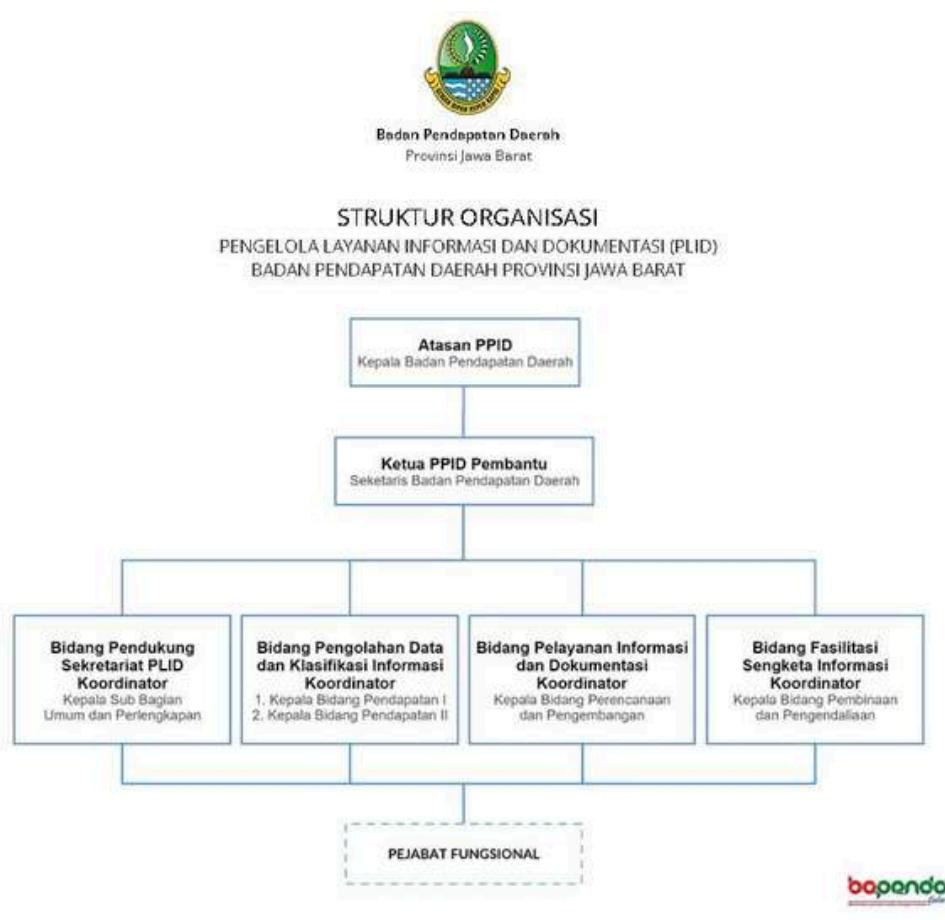
Maksud penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat maupun **stakeholder** terkait.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Struktur Organisasi PPID Bapenda Provinsi Jawa Barat



BAB II

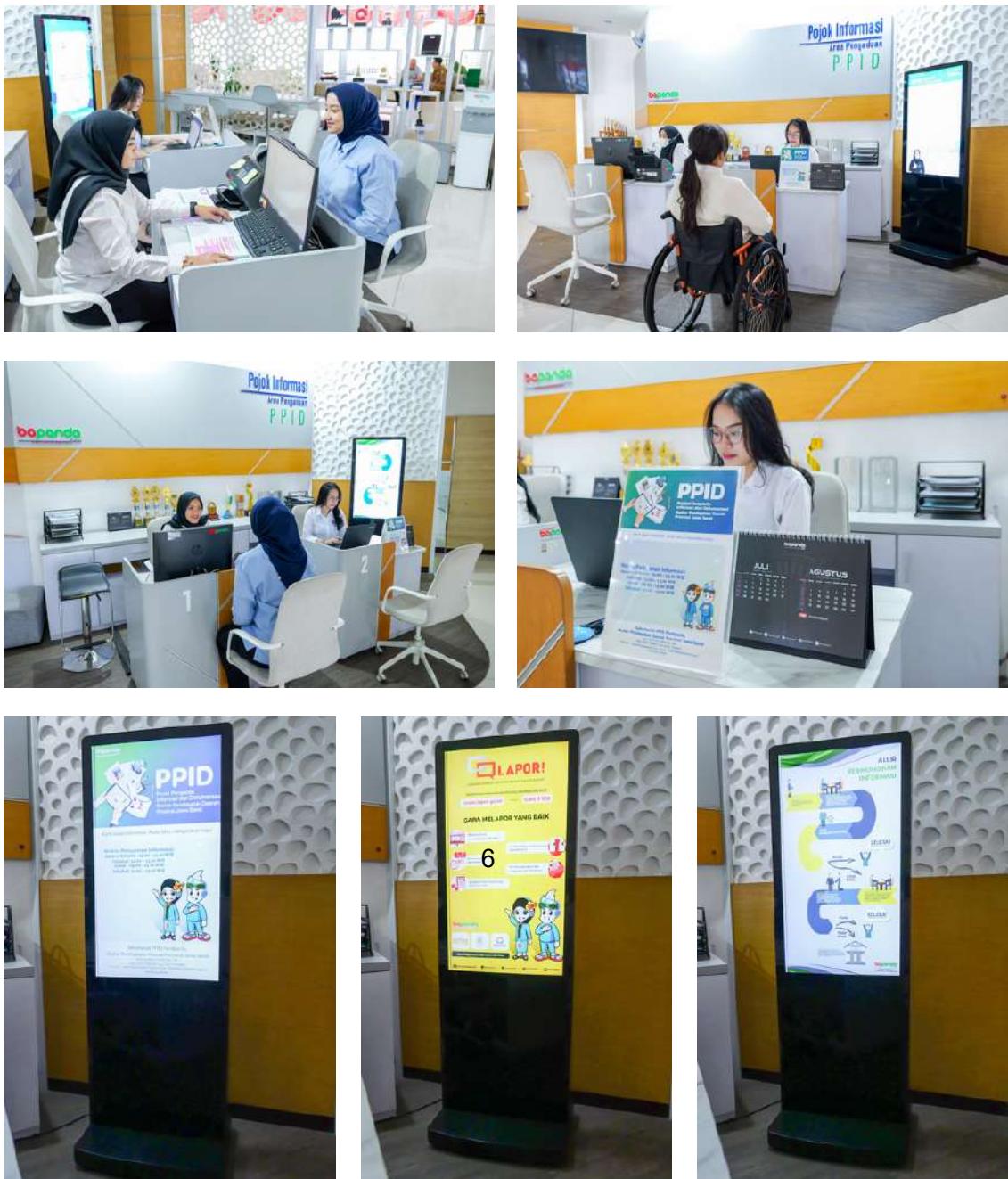
GAMBARAN UMUM PPID

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID pada dasarnya sudah memenuhi Sarana dan prasarana layanan informasi publik sesuai ketentuan yang di harapkan seperti:

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik

a. Ruangan dan Meja Pelayanan Informasi Publik



b. Papan Pengumuman Informasi



c. Sarana Khusus Bagi Pemohon Informasi Yang Berkebutuhan Khusus (difabel)



d. Formulir Permohonan Informasi Publik Bapenda Provinsi Jabar



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta No. 52B Telp. (022) 7568197 Faksimil. (022) 7564880
Website: bapenda.jabarprov.go.id - E-mail: bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40296

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(BAGIAN DUA)

No. Pendafataran (diisi petugas): _____

Nama/ Organisasi Pemohon: _____
No. KTP/ SIM/ Paspor: _____
No. Akta Pendirian/ surat organisasi: _____
No. SKT/ Kesbangpol/ surat organisasi: _____
Alamat: _____

Pekerjaan: _____
Nomor Telepon: _____
e-mail: _____
Rincian Informasi yang Dibutuhkan
(Jentikatai ketika baca petu)

Tujuan Penggunaan Informasi
(Jentikatai ketika baca petu)

Cara Memperoleh Informasi**

Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat***
 Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi**
(silakan juga Memperoleh Salinan Informasi)

Mengambil langsung
 Kuri
 Pos
 Faksimil
 Email

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan): _____

Bandung, _____/_____/20_____
Pemohon: _____

Keterangan:
*Dari surat ketiga berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
**Pilih salah satu dengan memerlukan tanda silang (X)
***Cara yang tidak perlu

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Silakan isi formulir permohonan informasi online ini. Anda juga dapat melakukannya permohonan informasi secara offline
Jika Anda mengalami kesulitan mengisi formulir permohonan informasi di bantuan Bantuan

Nama Organisasi/ Pemohon: * _____

No. Pendafataran (diisi petugas): * _____

No. Akta Pendirian/ surat organisasi: _____

No. SKT/ Kesbangpol/ surat organisasi: _____

Ketua: * _____

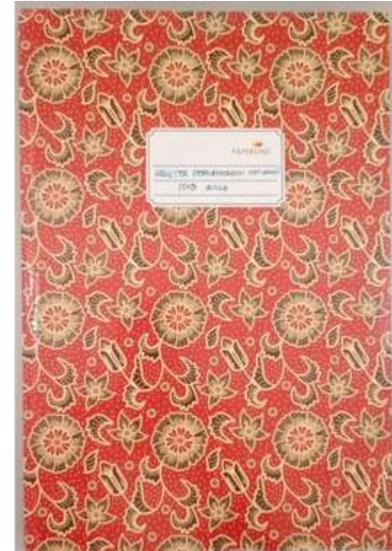
Nomor Telepon: * _____

e-mail: * _____

Jenis Informasi yang Dibutuhkan: *
 Cepat 1-3 hari
 Cepat 1-3 hari ABIA
 Cepat 1-3 hari Kepala
 Cepat 1-3 hari Kepala ABIA
 Cepat 1-3 hari Kepala Kepala
 Cepat 1-3 hari Kepala Kepala ABIA
 Cepat 1-3 hari Kepala Kepala Kepala
 Cepat 1-3 hari Kepala Kepala Kepala ABIA

Alasan Informasi yang Dibutuhkan: * _____

e. Buku Registrasi Pencatatan Permohonan Informasi Publik



f. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197 Faksimil (022) 7564880
 Website: bapenda.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id
 BANDUNG – 40286

UNTUK PEMOHON	No. Pengaduan: 03/Perm.Info/Bapenda/B/2023
---------------	--

TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pemohon/ Pengguna Informasi Publik:

Nama	: Vannisa Regita P
Tanggal Lahir	: Bandung, 10 Desember 2000
No. Identitas (KTP/ SIM/ Paspor)	: 3277035012000017
Nama Organisasi	: Unisha
Informasi yang Dimohonkan	: Permohonan izin Penetapan

Oleh Desk Layanan Informasi PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal
08/01/2023

Petugas. Pemohon

(.....) (.....)

g. Format Pemberitahuan Tertulis Sebagai Jawaban Atas Permohonan Informasi

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon (022) 7566197, Faksimil (022) 7564880
 Website: bapenda.jabarprov.go.id e-mail: bapenda@jabarprov.go.id
 BANDUNG – 40286

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Bantuan Permohonan Informasi pada Tanggal 08 Bulan Januari Tahun 2023 dengan nomor
pendaftaran 03/Perm.Info/Bapenda/B/2023. Kami pesanakan ke anda sebagai:

Nama	: Vannisa Regita P
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta No. 51 Lingk. 1
Pekanbaru	: Mahasiswa
No. Telepon/ e-mail	: 085314513113
Tujuan Permohonan	: Permohonan izin Penetapan

Pemberitahuan sebagai berikut

A. Informasi yang Diberikan

No.	Hal-hal Terhadap Informasi Berdasarkan	Referensi
1.	Bantuan/ Izin yang Tepat	<input checked="" type="checkbox"/> Sofitropy (berdasarkan teknologi informasi tertulis)
2.	Bantuan yang Diberikan	<input type="checkbox"/> Bantuan <input type="checkbox"/> Bantuan <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> Jumlah
3.	Waktu Penyelesaian	: Hari Kaga
4.	Eksistensi dan/atau ketersediaan informasi yang dimohon (misalkan: hasil survei)	

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:

Informasi yang diminta belum dikonfirmasi
Kewajiban informasi yang belum dikonfirmasi dilakukan dalam jangka waktu Hari
Kaga

Informasi yang diminta dikuasai oleh Badan Publik dan sebagi

Bandung, 09 Januari 2023
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
BANDAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SITI ANNISA SUHENDAR
NIP. 19830807 2010012012

h. Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Di Tempat Pelayanan Atau Kantor Perangkat Daerah.



2. Koordinasi secara berkala antara pengelola PPID Bapenda Jawa Barat dengan PIC Kehumasa di 34 P3D Se-Jawa Barat, Bidang teknis serta kepala P3D Wilayah Se-Jawa Barat (SAMSAT)

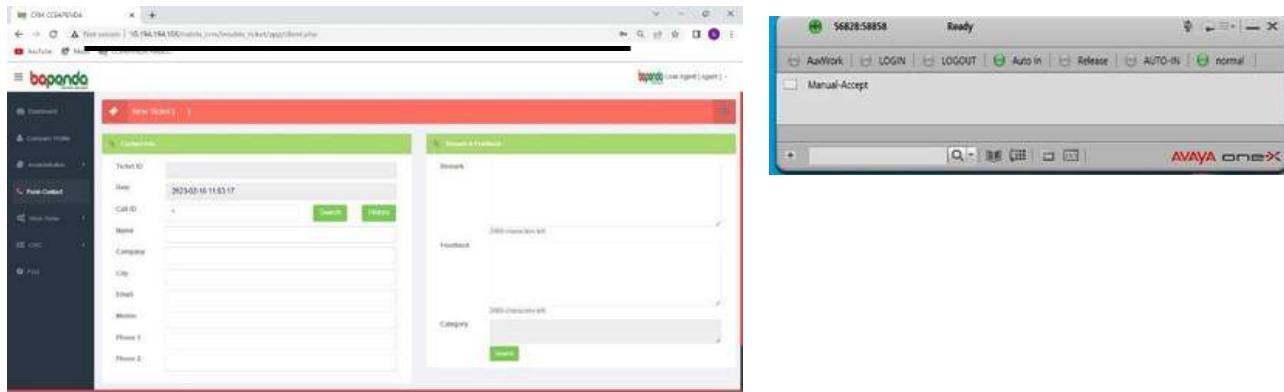


3. Inovasi Pengembangan Layanan Informasi dan Pengaduan Samsat Information Center :

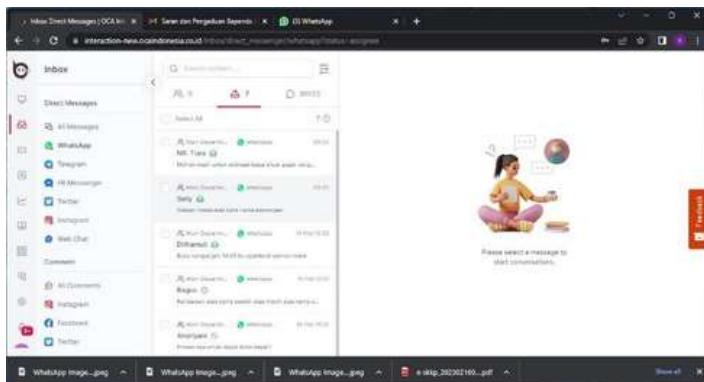
1. Samsat Information Center



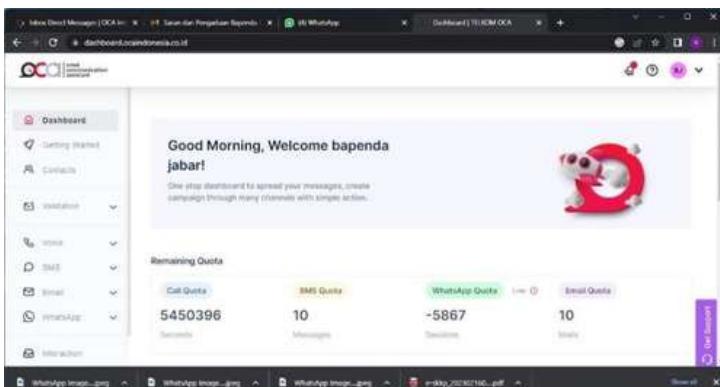
2. Call Center Halo Bapenda



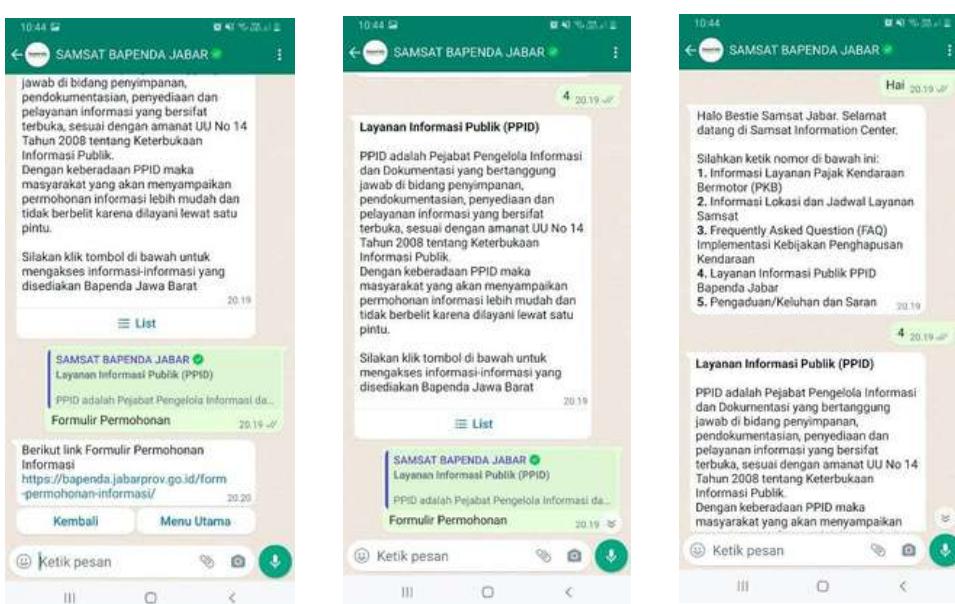
3. WhatsApp Chat Bot



4. WhatsApp Blast



5. Formulir permohonan informasi, Download Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Bapenda Jabar melalui aplikasi what's app chatbot pada Samsat Information center



BAB III

LAYANANINFORMASI PUBLIK

3.1.1 Pelayanan Informasi Publik dan Rincian Jumlah Permintaan

Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat disediakan secara **online** melalui **website** dan secara **offline** yaitu pemohon informasi meminta informasi dengan datang secara langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan rincian atau penjelasan terkait dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2022 pada Poin 3.1.2 tentang jumlah Permintaan Informasi Publik.

3.1.2 jumlah Permintaan Informasi Publik.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BANDAR PENDIDAKAN DAERAH**
Jalan Sockarto-Hatta No. 528 Telp. (022) 7566197 Fax. : (022) 7564880
BANDUNG - 40286

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023

Section 202

3.1.3 Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang diminta.

3.1.4 SP4N LAPOR Bapenda Jawa Barat

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (**SP4N**) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR!**) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. SP4N - LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan "**no wrong door policy**" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganiinya.

Adapun tujuan SP4N adalah agar :

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.1.5 Rincian Rekapitulasi SP4N LAPOR Bapenda Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Sudirman Raya No. 021 Telp. (021) 48287 Fax. (021) 756-0888
 BANDUNG - 40286

Nomor : 207/KDM/04.01/Sekret
LAMPIRAN SP4N LAPOR I PROVINSI JAWA BARAT
 TAHUN 2023

Bapenda Provinsi Jawa Barat, Jl. Dr. H. Dju Pudji, No. 26
 Kode Pos : 40132

No	Tanggal Akhir	Kategori Akhir	Jumlah akhir	Rincian Laporan Akhir	Verifikasi	Klasifikasi	Kategori	Periode
1	4 Januari 2023	Pembelahan Bahanan	Informasi 3.240	perbaikan informasi tentang SP4N di Bapenda Provinsi	Verifikasi	Pembelahan Bahanan	SP4N	2023
2	13 Januari 2023	PB	200K 3.240 total	Tidak terdapat SP4N selesai verifikasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
3	13 Januari 2023	Pungli	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
4	17 Januari 2023	(Bantuan/Transf. Terwakilkan)	Pembelahan Bahan Terwakilkan	Berkas Pembelahan Bahan terwakilkan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
5	27 Januari 2023	PB	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan terwakilkan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
6	28 Januari 2023	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
7	10 Februari 2023	Bantuan	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
8	18 Februari 2023	Retur	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
9	27 Februari 2023	Bantuan	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
10	27 Februari 2023	Bantuan dan Bantuan	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
11	8 Maret 2023	Pungli Pihak	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
12	12 Maret 2023	Pembelahan Perbaikan	Perbaikan	Perbaikan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
13	18 Maret 2023	Pungli	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
14	1 April 2023	Pembelahan Bahan	Informasi 3.240	perbaikan informasi, dan verifikasi pengajuan dana yang ada	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
15	5 April 2023	Keluhan Bawaslu	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
16	5 April 2023	Pungli Pihak	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
17	12 April 2023	Pembelahan Perbaikan	Perbaikan	Perbaikan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
18	18 April 2023	Pungli	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
19	19 April 2023	Pembelahan Bahan	Informasi 3.240	perbaikan informasi, dan verifikasi pengajuan dana yang ada	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
20	5 Mei 2023	Keluhan Bawaslu	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
21	5 Mei 2023	Pungli Pihak	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
22	12 Mei 2023	Pembelahan Perbaikan	Perbaikan	Perbaikan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
23	18 Mei 2023	Pungli	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
24	29 Mei 2023	Pembelahan Bahan	Informasi 3.240	perbaikan informasi, dan verifikasi pengajuan dana yang ada	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
25	5 Juni 2023	Keluhan Bawaslu	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
26	5 Juni 2023	Pungli Pihak	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
27	12 Juni 2023	Pembelahan Perbaikan	Perbaikan	Perbaikan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
28	18 Juni 2023	Pungli	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
29	29 Juni 2023	Pembelahan Bahan	Informasi 3.240	perbaikan informasi, dan verifikasi pengajuan dana yang ada	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
30	5 Juli 2023	Keluhan Bawaslu	Pembelahan Bahan	Pembelahan Bahan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
31	5 Juli 2023	Pungli Pihak	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
32	12 Juli 2023	Pembelahan Perbaikan	Perbaikan	Perbaikan	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023
33	18 Juli 2023	Pungli	Pungli 23.000 Rup. Cukiran	Tidak terdapat informasi pengajuan dana	Verifikasi	Pengajuan	SP4N	2023

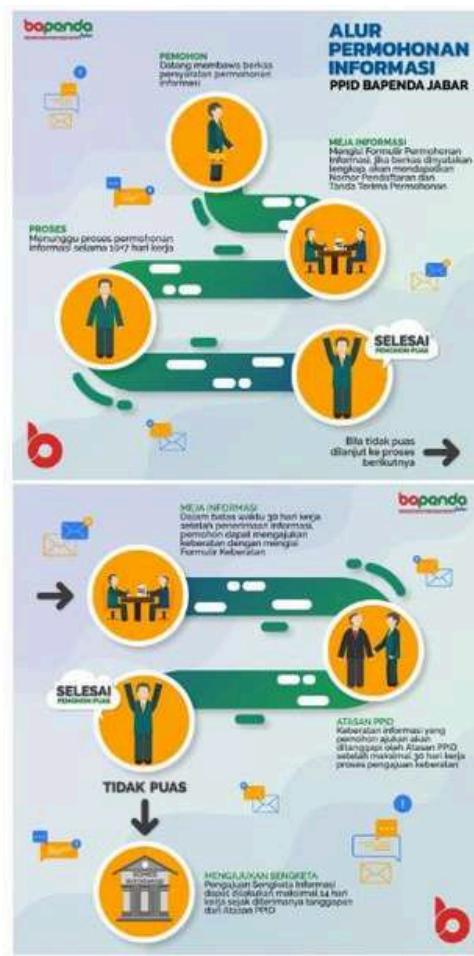
BAB IV

Dinding, 26 Desember 2023

Mengakabul,
 Selamat Bakti Galau
ATAGAN PIPD PEMERINTAH

Diketahui yang selanjutnya adalah:
SEBUAH TAHUN BAPENDA DAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
 MAULANA INDRA WIBAWA, S.H., M.H.
 Pemberi Tanda

3.1.6 Alur Permohonan Informasi Publik Bapenda Jawa Barat



BABIV

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada standar layanan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini kami buat. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 18 Januari 2024
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

MAULANA INDRA WIBAWA, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I